D.N. AIDIT

PKI
dan
ALRI (SESKOAL)

D. N. AIDIT

Menteri/Wakil Ketua MPRS/
Ketua CC PKI

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1963

rentjana kulit :

nugroho
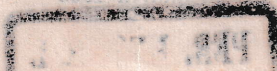
Sekedar Pengantar

Brosur *PKI dan ALRI (SESKOAL)* ini memuat tjeramah Menteri/Wakil Ketua MPRS/ Ketua CC PKI D.N. Aidit dihadapan para mahasiswa Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL) di Djakarta. Tjeramah itu diberikan pada tanggal 16 Djuli 1963 dan bertemakan *Beberapa Masalah Politik Dan Pertahanan.*

Selain mengupas berbagai soal pokok Revolusi Indonesia, hubungan pertahanan dengan strategi umum Revolusi Indonesia dan hubungan Angkatan Bersendjata dengan Rakjat dalam pelaksanaan pertahanan, pentjeramah membahas pula suatu masalah penting bagi negara kita, jaitu konsep negara maritim.

Dengan menerbitkan tjeramah tersebut kami harapkan dapat memberi sumbangan untuk mendjadikan masalah pertahanan masalah seluruh Rakjat Indonesia. Hal ini pasti akan memperlantjar pelaksanaan Ketetapan MPRS no. II/1960 mengenai pertahanan Rakjat dan memperkuat persatuan semua kekuatan revolusioner dinegeri kita.

Penerbit

Agustus 1963

Saja sungguh merasa gembira dan oleh karena itu mengutjapkan terimakasih jang se-besar²nja atas kesempatan jang diberikan kepada saja baik sebagai Menteri/Wakil Ketua MPRS maupun sebagai Ketua Comite Central Partai Komunis Indonesia, salahsatu Partai NASAKOM, untuk memberikan tjeramah dihadapan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL). Tak perlu kiranja saja djelaskan, bahwa ini bukan pertama kalinja saja diminta memberi tjeramah dimuka Angkatan Bersendjata Republik Indonesia. Bahkan dengan adanja tjeramah ini sudah bisa dikatakan bahwa tradisi mentjapai saling pengertian dan saling mengenal antara Angkatan Bersendjata dengan berbagai golongan Rakjat termasuk kaum Komunis, telah tertanam didalam setiap Angkatan Bersendjata kita.

Sewaktu saja dalam bulan Februari jl. memberi tjeramah dimuka para mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), antara lain saja katakan, bahwa ada orang jang bingung mendengar bahwa Ketua PKI memberi tjeramah kepada kader² kepolisian. Sudah tentu, dengan adanja tjeramah ini, tjeramah kepada kader² tinggi Angkatan Laut Republik Indonesia, dan sebelum ini telah diberikan pula tjeramah² kepada

kader² tinggi AURI dan kader² tinggi ADRI, kebingungan orang² itu semakin men-djadi², sebab ternjata semua Angkatan Bersendjata benar² mendjalankan wedjangan Presiden Sukarno jang dikemukakan dalam pidato „Tahun Kemenangan" tanggal 17 Agustus, 1962, jaitu *„memberantas komunisto-phobi"*. Biarkanlah mereka bingung, kita berdjalan terus !

Memang memberantas Komunisto-phobi merupakan tugas mutlak dalam meneruskan perdjuangan Rakjat Indonesia untuk menjelesaikan Revolusi, karena Komunisto-phobi dengan sendirinja berarti Nasakom-phobi, Rakjat-phobi, massa-phobi, buruh-phobi dan tani-phobi. Phobi² ini adalah ibarat djarum ratjun jang menusuk persatuan nasional kita. Pada kesempatan ini, saja memberi hormat se-tinggi²nja kepada Angkatan Laut R.I. dan kepada semua Angkatan Bersendjata jang, melalui tjeramah² sematjam ini, melakukan sesuatu jang kongkrit sekali untuk memberantas phobi² itu.

Tema jang akan saja bahas dalam tjeramah ini adalah tentang *„Beberapa Masalah Politik dan Pertahanan"*. Sungguh suatu tema jang amat penting ! Sebagaimana saja djelaskan dalam tjeramah saja di SESKOAD belum lama berselang, segala soal politik dan sosial jang mau kita bahas, haruslah kita bahas dalam hubungan dengan Revolusi Indonesia. Begitu pula dengan tema tjeramah saja sekarang. Dalam hubungan dengan tema ini, politik adalah strategi dan taktik pimpinan dari perdjuangan Rakjat Indonesia untuk mentjapai tjita² dan tudjuan Revolusi, untuk menjelesaikan Revo-

lusi, sedangkan pertahanan adalah strategi dan taktik pelaksanaan jang dilakukan Angkatan Bersendjata RI ber-sama[2] dengan seluruh Rakjat dibidang pertahanan militer dan keamanan untuk membela, menjelamatkan, mengabdi dan memenangkan perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia itu. Kedua-duanja harus tunduk pada strategi umum Revolusi Indonesia jang digariskan dalam Manipol, jaitu bahwa sekarang ini Rakjat Indonesia harus menjelesaikan Revolusinja jang bersifat nasional dan demokratis sebagai landasan untuk selandjutnja memasuki fase atau tahap kedua Revolusi Indonesia jang bersifat Sosialis, artinja jang bertudjuan dan bertugas membangunkan masjarakat sosialis jang adil.

Politik dan pertahanan adalah dwitunggal jang jang tak dapat di-pisah[2]kan apalagi dipertentangkan, seperti halnja Rakjat dengan Angkatan Bersendjata adalah dwitunggal jang djuga tak dapat dipisah-pisahkan apalagi dipertentangkan. Usaha[2] untuk memisahkan apalagi mempertentangkan politik dengan pertahanan atau Rakjat dengan Angkatan Bersendjata adalah usaha kontra-revolusioner, karena menghambat dan mempersulit perdjuangan kita bersama untuk menjelesaikan revolusi kita.

Seperti halnja perdjuangan Rakjat harus dipimpin oleh politik jang tepat, djuga pertahanan harus dipimpin oleh politik jang tepat. Seperti halnja perdjuangan Rakjat Indonesia harus dipimpin Manifesto Politik jang menggariskan strategi umum Revolusi Indonesia, djuga pertahanan Republik

Indonesia harus dipimpin Manifesto Politik. Ini satu²nja djaminan bahwa perdjuangan Rakjat tepat; ini satu²nja djaminan bahwa pertahanan RI tepat.

Tjeramah ini akan saja bagi dalam dua bagian. Jang pertama, *Beberapa Soal Tentang Politik* dan jang kedua, *Beberapa Soal Tentang Pertahanan*.

I. BEBERAPA SOAL TENTANG POLITIK

Diatas saja sudah menjebut tentang strategi umum Revolusi Indonesia, jaitu strategi daripada perdjuangan Rakjat Indonesia dalam menjelesaikan revolusi kita. Djika kita berbitjara tentang strategi umum revolusi, saja rasa bagi kita harus per-tama² djelas apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan revolusi. Kita semua setiap hari bitjara tentang revolusi dan tentang kontra-revolusi, tentang orang revolusioner dan orang kontra-revolusioner. Djelas kiranja, bahwa kalau belum ada pengertian jang tepat mengenai apa jang dimaksud dengan revolusi, tentunja pembitjaraan² itu tak lain hanja omong-kosong dan bisa berbahaja.

Revolusi bukan suatu tjetusan perasaan marah orang² jang bersifat subjektif dan jang setjara amuk²an dan membabibuta mau mengubah hal jang tidak disukainja. Revolusi adalah suatu perubahan dan perombakan kwalitatif dan strukturil dari masjarakat sebagai suatu keharusan objektif sedjarah jang terdjadi sesuai dengan hukum² perkembangan masjarakat.

Dasar daripada perkembangan masjarakat jalah produksi kekajaan materiil, karena memang tidak mungkin ada masjarakat jang dapat hidup djika tidak ada kekajaan materiil. Bajangkanlah betapa rupanja „masjarakat" tanpa kekajaan materiil hasil produksi kaum buruh dan kaum tani ! Sudah terang

kita tidak berani, dan bahkan tidak mungkin berkumpul disini! Hubungan² sosial jang tertjiptakan antara manusia dengan manusia, jaitu susunan masjarakat, djustru timbul dalam proses manusia menundukkan alam dan mentjiptakan kekajaan materiil untuk kepentingan kelangsungan dan perbaikan kehidupan manusia sendiri.

Setelah mendengar pendjelasan saja ini, mungkin ada jang terus memberi reaksi: Nah, lihat, orang² Komunis memang orang² „materialis", hanja memikirkan materi, tidak memikirkan ide, tidak punja „idealisme". Reaksi² jang demikian tidak mempunjai dasar samasekali, sebab djustru karena kaum Komunis mendasarkan pengertiannja mengenai masjarakat kepada kenjataan jang objektif, jaitu kekajaan materiil, maka terbukalah kemungkinan untuk merealisasi ide² atau tjita² kita, ide² atau tjita² seluruh umatmanusia, artinja untuk mentjiptakan masjarakat jang bisa mendjamin kemakmuran untuk setiap orang, untuk mentjiptakan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Tjita² manusia jang paling luhur itu akan tinggal sebagai tjita² atau impian belaka kalau kita tidak mempunjai alat² untuk merealisasi tjita² itu, jaitu pengertian jang tepat mengenai hukum² perkembangan masjarakat. Djadi, kaum Komunis mengakui peranan aktif daripada ide, peranan ide dalam mengubah keadaan. Tetapi kaum Komunis tidak mungkin membajangkan adanja ide tanpa didahului adanja materi, misalnja otak. Ide tidak bisa kelujuran tanpa materi, chususnja tanpa otak.
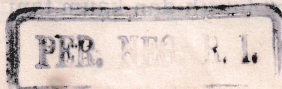
PEMILIKAN ATAS ALAT² PRODUKSI MENENTUKAN HUBUNGAN² ANTAR-MANUSIA

Sedjarah perkembangan masjarakat mengadjar kepada kita bahwa tenaga² produktif, jaitu tenaga-tenaga jang mentjiptakan kekajaan materiil termasuk alat² kerdja, sasaran kerdja dan tenaga kerdja, berkembang setjara terusmenerus, setjara tak ter-putus². Kedjajaan manusia untuk mentjipta, untuk menundukkan alam agar memenuhi kebutuhan² manusia sendiri memang tak terbatas dan sungguh mengagumkan. Tetapi dalam proses mentjiptakan kekajaan materiil melalui tenaga² produktif itu, timbullah hubungan² produksi, jaitu *hubungan antara manusia dengan manusia* jang pada pokoknja ditentukan oleh kenjataan *siapa jang memiliki alat² produksi jang terpenting, siapa jang menguasai proses produksi itu.*

Sedjarah perkembangan masjarakat mengadjar kepada kita bahwa dalam setiap masjarakat jang berdasarkan pemilikan perseorangan atas alat² produksi, jaitu jang berdasarkan penghisapan oleh mereka jang memiliki alat² produksi atas mereka jang tidak memiliki alat² produksi, akan tiba waktunja dimana hubungan² produksi itu merupakan belenggu terhadap perkembangan setjara terus-menerus tenaga² produktif itu. Hubungan² produksi jang bersifat feodal dimana tuantanah menghisap kaum tani merupakan belenggu terhadap perkembangan tenaga² produktif dalam masjarakat feodal. Hubungan² produksi jang bersifat kapitalis, dimana burdjuasi (kapitalis) menghisap proletariat,

merupakan belenggu terhadap perkembangan tenaga² produktif dalam masjarakat kapitalis. Hubungan² produksi dalam masjarakat Indonesia sekarang mengambil bentuk kekuasaan modal monopoli asing, jaitu kekuasaan imperialis, jang bersekutu dengan kaum feodal, jang merupakan belenggu terhadap tenaga² produktif kaum buruh dan seluruh Rakjat Indonesia jang dihisap oleh imperialisme dan sisa² feodalisme.

Kontradiksi antara tenaga² produktif dengan hubungan² produksi didalam proses perkembangannja menimbulkan revolusi. Ini berarti, bahwa kontradiksi itu harus diselesaikan dengan melalui revolusi. Tudjuan daripada revolusi jalah untuk mengachiri hubungan² produksi jang telah mendjadi belenggu itu, artinja mengubah susunan masjarakat dan membangun masjarakat baru jang membebaskan tenaga² produktif untuk bisa berkembang tanpa halangan. Perdjuangan kaum tani melawan penghisapan feodal dan perdjuangan seluruh Rakjat melawan penghisapan imperialis atau kekuasaan imperialis merupakan perdjuangan untuk menjelesaikan revolusi kita. Tanpa perdjuangan-perdjuangan itu, revolusi Indonesia tidak akan bisa diselesaikan.

Kalau apa jang dimaksudkan dengan revolusi sudah djelas, maka tidak sulit bagi kita untuk mendjelaskan apa jang dimaksudkan dengan Rakjat. Rakjat berarti semua golongan jang berkepentingan supaja revolusi itu diselesaikan, jaitu semua golongan jang ikut berevolusi. Dan oleh karena Revolusi Indonesia merupakan revolusi anti-feodal

dan anti-imperialis, maka bagi Indonesia, Rakjat jang ikut berevolusi adalah semua golongan jang dihisap atau jang dirugikan oleh feodalisme dan imperialisme itu. Djadi, orang[2] Indonesia jang memihak imperialisme dan feodalisme tidak mungkin kita masukkan kategori Rakjat, mereka termasuk kategori anti-Rakjat, walaupun mereka warganegara Indonesia.

ORANG REVOLUSIONER ADALAH ORANG JANG AKTIF MEMIHAK PERDJUANGAN RAKJAT

Selandjutnja, kita perlu pula mentjapai pengertian jang tepat mengenai apa jang dimaksudkan dengan orang revolusioner. Bung Karno telah berulang[2] berkata bahwa *„pada achirnja manusialah jang menentukan"*. Jang dimaksudkan dengan ini jalah bahwa tugas[2] disetiap bidang kenegaraan atau kemasjarakatan hanja bisa didjalankan oleh orang[2] jang menjatukan diri atau jang mengintegrasikan diri dengan tugas[2] revolusi kita. Revolusi jang berarti suatu perubahan susunan masjarakat setjara strukturil dan hakiki tidak akan bisa berdjalan djika kekuasaan negara tidak disesuaikan dengan susunan masjarakat baru jang harus dibangun. Bagaimanapun djuga, kekuasaan negara adalah didjalankan oleh orang[2] jang memegang kekuasaan, dan dengan sendirinja kekuasaan negara hanja bisa dikatakan sesuai dengan susunan masjarakat jang harus dibangun djika kekuasaan negara diisi dengan orang[2] revolusioner, jaitu orang[2] jang mengintegrasikan diri dengan

perdjuangan Rakjat untuk menjelesaikan revolusi, jang sepenuhnja dan setjara aktif berfihak pada perdjuangan Rakjat. Dalam revolusi anti-imperialis dan anti-feodal, maka tjiri² pokok orang² revolusioner jalah tjiri² anti-imperialis dan anti-feodal; dan karena revolusi Indonesia berperspektif Sosialisme, maka orang² revolusioner harus ber-tjita² Sosialisme.

Mungkin masih ada orang jang beranggapan, bahwa orang² revolusioner tjukup berketjimpung dibidang kepartaian dan organisasi massa sadja, sedangkan dalam kekuasaan negara orang² harus „objektif", „berdiri diatas politik", „tidak berfihak". Anggapan ini adalah anggapan jang salah dan reaksioner, karena bisa membuka pintu bagi kaum kontra-revolusioner untuk bertjokol dalam alat² kekuasaan negara. Padahal, dalam tiap revolusi soal jang terpenting adalah soal kekuasaan negara.

Didalam suatu revolusi, *jang objektif jalah berfihak kepada revolusi, berfihak kepada keharusan objektif daripada perkembangan masjarakat.* Sikap-sikap jang lain adalah sikap² jang subjektif, sebab siapapun jang tidak aktif mengintegrasikan diri dengan revolusi, jang tidak berfihak kepada revolusi, jang tidak menjesuaikan dan mendasarkan segala kegiatan²nja serta tindakan²nja pada kebutuhan revolusi paling sedikit akan menghambat revolusi, dan malahan sedar atau tidak, bisa dipergunakan untuk maksud² kontra-revolusi. Djadi kelirulah pendapat sementara orang jang berkemauan baik jang mengatakan bahwa kita tidak

boleh bersikap objektif terhadap revolusi. Djuga keliru pendapat sementara orang jang berkemauan buruk jang mengatakan, bahwa berfihak kepada revolusi berarti bersikap tidak objektif. Pendapat² ini disamping tidak benar, djuga bersifat membenarkan „keobjektifan" kaum reaksioner. Bukankah kaum reaksioner dan kontra-revolusioner selalu bersembojan „objektif", „tidak berfihak" untuk kegiatan kontra-revolusi mereka? Padahal, merekalah manusia² jang paling subjektif, paling beratsebelah, karena mereka menentang arus revolusi jang objektif. Kita tidak boleh tertipu oleh sembojan² itu. Sembojan² itu sengadja dipergunakan karena dalam keadaan Rakjat sedang mendjalankan revolusi, maka sembojan jang terang²an berlawanan dengan revolusi akan sangat mudah membuka kedok kaum kontra-revolusi sehingga akan menggagalkan usaha² mereka sebelum dimulai. *Djadi, sikap jang paling objektif adalah sikap memihak Rakjat dan revolusi, karena perkembangan objektif adalah menurut kehendak Rakjat dan sesuai dengan hukum² revolusi.*

Djika kita ingin menjelesaikan revolusi, maka seluruh aparatur negarapun harus didjalankan oleh orang² revolusioner, jaitu orang² jang mendasarkan setiap kegiatan serta tindakannja pada prinsip-prinsip pokok revolusi itu, jang tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia. Partai² politik harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia. Organisasi² massa serta organisasi² lain harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia. Angkatan Bersendjata, jaitu seluruh

aparat pertahanan dan keamanan, harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia, seluruh aparatur negara harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia. Hanja djika demikian, maka akan terbukalah kemungkinan bagi kita untuk menjelesaikan revolusi kita dalam arti kata jang sesungguhnja.

STRATEGI UMUM REVOLUSI INDONESIA DITENTUKAN DALAM MANIPOL

Apa jang dimaksudkan dengan „strategi umum Revolusi Indonesia" ? Bagi kita di Indonesia, pertanjaan itu sudah tidak sulit untuk didjawab karena kita sudah mempunjai dokumen resmi jang memberi djawabannja, jaitu Manifesto Politik. Sungguh untung kita, dengan memiliki Manipol itu kita sudah tidak perlu debat² lagi mengenai hal jang sedemikian pokok itu. Karena Manipol merupakan garis jang memimpin kita semua, merupakan haluan jang telah ditetapkan oleh MPRS sebagai haluan negara, maka kita telah melewati satu tingkat jang berat. Dengan adanja Manipol jang telah diterima oleh semua golongan Rakjat jang berevolusi, dan jang telah diterima oleh seluruh Angkatan Bersendjata, maka telah hilang alasan pokok untuk timbulnja kontradiksi diantara dua sektor masjarakat kita. Keheranan orang² asing, misalnja, djika melihat Komunis diundang untuk memberi tjeramah kepada pegawai² Departemen ini, kepada Angkatan Bersendjata itu, gampang didjawab. Manipol adalah program bersama

seluruh Rakjat Indonesia termasuk Angkatan Bersendjata, djadi tidak ada alasan sedikitpun untuk adanja Komunisto-phobi atau anti-Komunisme seperti di-negara² imperialis. Jang perlu sekarang jalah untuk mendjalankan program bersama itu. Jang perlu sekarang jalah untuk mentjapai pengertian tentang tjara mendjalankan program bersama itu, dan untuk ber-sama² menjingkirkan setiap penghalang terhadap maksud jang mulia itu.

Seperti dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam pidato Resopim, tanggal 17 Agustus 1961 : *„Negara dan Rakjat sudah menerima Manipol dengan ketetapan MPRS-nja, maka semua warga sekarang harus dipimpin Manipol. Rakjat sudah dipimpin oleh Manipol, militer djuga harus dipimpin oleh Manipol. Bukan militer atau bedil jang memimpin Manipol tetapi Manipol jang memimpin militer atau bedil".* (*Re-so-pim,* Departemen Penerangan, Penerbitan Chusus no. 180, hal. 29). Inilah jang oleh kami kaum Komunis dinamakan „politik adalah djenderal".

Mari kita bahas sekarang strategi umum Revolusi Indonesia seperti digariskan didalam Manipol. Manipol menjatakan bahwa *„kewadjiban² Revolusi Indonesia jang terpenting jalah membebaskan Indonesia dari semua imperialis dan menegakkan tiga segi kerangka".* Dan apa jang dimaksudkan dengan tiga segi kerangka itu ?

„Kesatu, Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai ke Merauke".

Artinja, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia jang nasional dan demokratis.

„Kedua, Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu". Artinja, berharidepan masjarakat Sosialis Indonesia, masjarakat jang adil atau masjarakat jang tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, sebagai persiapan untuk menudju kemasjarakat adil dan makmur, masjarakat jang oleh kami kaum Komunis dinamakan masjarakat Komunis.

„Ketiga, Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati satu sama lain dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna". (*Tubapi*, hal. 81). Artinja, mendjalankan politik luarnegeri jang bebas-aktif, jang anti-imperialis, untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian dunia.

Dengan demikian, tiga segi kerangka Manipol memberi gambaran jang sangat djelas tentang sifat masjarakat jang harus dibangun, tentang sifat negara jang diperlukan, tentang pokok² politik dalamnegeri dan luarnegeri daripada negara itu.

Selandjutnja, tentang sifat Revolusi Indonesia, Manipol menjatakan sbb.: *„Revolusi Indonesia adalah Revolusi nasional menentang imperialisme-kolonialisme"* dan bahwa walaupun *„Revolusi Indonesia bersifat multi-complex, tetapi sifat nasio-*

nal daripada Revolusi Indonesia adalah sangat menondjol". (*Tubapi,* hal. 84).

Selandjutnja dikatakan bahwa: *„Disamping sifat nasionalnja, Revolusi Indonesia, sebagai djuga semua revolusi dizaman modern sekarang, adalah revolusi demokratis. Sifat demokratis daripada revolusi Indonesia dinjatakan oleh tugasnja menentang keterbelakangan feodal dan menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan".* (*Tubapi,* hal. 84). Pendeknja, sasaran² pokok Revolusi Indonesia jalah imperialisme dan feodalisme. Revolusi Indonesia adalah revolusi anti-imperialis dan anti-feodal.

Dengan demikian mendjadi djelas strategi umum Revolusi Indonesia, jaitu: menghantjurkan imperialisme dan feodalisme, mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia jang nasional dan demokratis, sebagai sjarat mutlak untuk menudju kemasjarakat Sosialis Indonesia.

REVOLUSI INDONESIA REVOLUSI SEMUA KLAS DAN GOLONGAN ANTI-IMPERIALIS

Berdasarkan ini semua, Manipol selandjutnja menetapkan, bahwa *„revolusi Indonesia adalah revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme-kolonialisme"* dan bahwa tugas daripada Revolusi Indonesia adalah untuk *„mendirikan kekuasaan Gotong-Rojong, kekuasaan demokratis jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan, jang mendjamin terkonsentrasinja*

seluruh kekuatan nasional, seluruh kekuatan Rakjat". (*Tubapi,* hal. 85).

Tugas ini berarti bahwa kekuasaan jang harus didirikan jalah kekuasaan jang bersih dari aspek anti-Rakjat. Tentunja kekuasaan jang mengandung aspek anti-Rakjat tidak bisa diharapkan akan mendjamin terkonsentrasinja seluruh kekuatan Rakjat. Bukankah penegasan Manipol ini penegasan jang paling djelas dan tak meragukan lagi tentang tudjuan rituling kekuasaan atau aparatur negara ? Aspek pro-Rakjat harus diperkuat, dan aspek anti-Rakjat harus dilenjapkan dengan djalan mengusir elemen² anti-Rakjat dari kekuasaan negara. Demikianlah tjara satu²nja dalam melaksanakan Manipol dibidang kekuasaan negara.

Dengan menetapkan pokok² ini, Manipol selandjutnja menetapkan pula tentang kekuatan² sosial daripada Revolusi Indonesia. Dikatakan sbb. : *„Djadi, djelaslah bahwa kekuatan² sosial Revolusi Indonesia, jaitu seluruh Rakjat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokoknja tanpa melupakan peranan penting dari golongan² lain, adalah sangat besar dan mejakinkan akan menangnja Revolusi Indonesia".* (*Tubapi,* hal. 84). Dan mengapa dikatakan bahwa kaum buruh dan kaum tani merupakan kekuatan pokok ? Inipun djuga didjelaskan dalam Manipol sbb. : *„Dengan tidak mengurangi arti dari klas² dan golongan² lain sebagaimana sering di-tekan²kan oleh Presiden Sukarno, kaum buruh dan kaum tani, baik karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja, harus mendjadi kekuatan po-*

kok dalam revolusi dan harus mendjadi soko-guru masjarakat adil dan makmur di Indonesia". (*Tubapi,* hal. 82). Djadi *„karena vitalnja maupun karena sangat banjak djumlahnja".* Dan kalau Manipol berbitjara tentang vitalnja kaum buruh dan kaum tani, ini tak lain tak bukan oleh karena kedua klas atau golongan itu merupakan pentjipta² utama kekajaan materiil didalam masjarakat.

BAGIAN TERBESAR ANGKATAN BERSENDJATA ANAK² BURUH DAN TANI

Saja tidak akan djemu²nja menekankan kepada pendjelasan Manipol ini, sebab ada orang jang suka lupa akan vitalnja kaum buruh dan kaum tani, dan jang malahan menganggap kaum buruh dan kaum tani tidak vital, tidak perlu diperhitungkan dan diperhatikan, tidak perlu diikutsertakan, malahan dengan tindakan²nja mereka djustru memberi kesan bahwa jang mereka anggap vital jalah untuk mengindjak hak² kaum buruh dan kaum tani, dan menindas gerakan² mereka. Sikap jang demikian berlawanan dengan Manipol dan berlawanan dengan strategi umum Revolusi Indonesia. Sikap jang demikian, sedar atau tidak, pada dasarnja merupakan sikap jang kontra-revolusioner. Kalau kita sekarang membahas tema politik dan pertahanan, maka dapat ditegaskan bahwa sikap jang demikian tidak boleh diberi tempat dalam aparatur pertahanan kita, lebih² karena bagian terbesar anggota Angkatan Bersendjata kita terdiri dari anak² kaum buruh dan terutama anak²

kaum tani jang „sangat banjak djumlahnja" itu. Pada hakekatnja, Angkatan Bersendjata kita adalah „kaum tani bersendjata".

Djika telah ditetapkan bahwa Revolusi Indonesia adalah revolusi bersama dari semua klas dan golongan jang menentang imperialisme, kolonialisme, dan dengan sendirinja djuga neo-kolonialisme, maka mendjadi djelas pula mengapa front persatuan nasional merupakan hal jang mutlak perlu bagi berhasilnja revolusi kita itu. Tentang apa jang dimaksudkan dengan front persatuan nasional, oleh Presiden Sukarno sudah diberikan berbagai rumusan, antara lain „samenbundeling van alle revolutionnaire krachten" (istilah jang dipergunakan didalam pidato Konsepsi Presiden jang diutjapkan pada tanggal 21 Februari, 1957) atau „konsentrasi kekuatan nasional" (istilah jang dipergunakan didalam Manipol). Didalam Manipol, Bung Karno berkata bahwa *„modal pokok bagi tiap² revolusi nasional, menentang imperialisme-kolonialisme jalah konsentrasi kekuatan nasional, dan bukan perpetjahan kekuatan nasional"* (*Tubapi*, hal. 82).

Djadi, tugas untuk mentjiptakan dan menggalang front persatuan nasional adalah tugas revolusioner, dan sebaliknja, usaha² untuk memetjah-belah front persatuan nasional adalah usaha² kontra-revolusioner.

PANTJASILA ALAT PEMERSATU !

Berbitjara tentang front persatuan nasional tidak bisa dianggap lengkap kalau kita tidak se-

kaligus berbitjara pula tentang Pantja Sila. Mengapa demikian ? Pantja Sila selalu dikemukakan sebagai filsafat negara Republik Indonesia. Ini jalah, karena Pantja Sila djustru mentjerminkan kenjataan bahwa Rakjat Indonesia meliputi berbagai golongan, sukubangsa serta aliran jang berbeda-beda, sedangkan perbedaan² itu bisa dirumuskan dalam satu rangkaian Sila² jang diakui bersama oleh seluruh bangsa. Djustru karena perbedaan² itu, Rakjat kita membutuhkan Pantja Sila sebagai alat pemersatu. Djustru karena perbedaan² itu, Rakjat Indonesia membutuhkan front persatuan nasional. Ini mentjerminkan toleransi revolusioner jang tinggi jang telah mendjiwai gerakan kemerdekaan nasional Indonesia sedjak semula dan terutama sedjak tahun² duapuluhan.

Djadi filsafat jang digambarkan dalam Pantja Sila itu jalah filsafat persatuan atau *filsafat Gotongrojong*. Dalam pidatonja pada tanggal 1 Djuni 1945 jang berdjudul *Lahirnja Pantjasila*, Bung Karno berkata : *„Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga dan tiga mendjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan 'Gotong-rojong'. Negara Indonesia jang kita dirikan haruslah negara Gotong-rojong !"* (*Tubapi*, hal. 37). Oleh karena itulah, Presiden Sukarno selalu dengan tepat menamakan Pantja Sila sebagai alat pemersatu.

Mari kita memperhatikan benar² apa jang dikatakan oleh Presiden Sukarno mengenai hal ini :

„Pantja Sila adalah alat pemersatu ! Pantja Sila bukan alat pemetjahbelah ! Dengan Pantja Sila,

kita djuga mempersatukan tiga aliran besar jang bernama Nasakom itu. Djadi, djangan mempergunakan Pantja Sila untuk memetjah-belah Nasakom, mempertentangkan kaum nasionalis dengan kaum agama, kaum agama dengan kaum komunis, kaum nasionalis dengan kaum komunis. Siapa jang main² dengan Pantja Sila untuk maksud² pengadudombaan itu, ia adalah orang jang samasekali tak mengerti Pantja Sila atau orang jang durhaka kepada Pantja Sila atau orang jang .... kepalanja sinting". (*Resopim*, Departemen Penerangan, Penerbitan Chusus, no. 180, hal. 42).

Bukankah ini suatu penegasan jang se-tegas²-nja ? Tanpa tedeng aling². Orang jang memereteli satu Sila untuk mengadu salahsatu aliran revolusioner dengan aliran revolusioner lainnja dalam masjarakat adalah orang jang tidak mengerti Pantja Sila *atau* orang jang durhaka kepada Pantja Sila *atau* orang jang ... kepalanja sinting. Demikianlah penilaian jang sewadjarnja terhadap orang² jang mempergunakan Pantja Sila sebagai alat pemetjah-belah.

NASAKOM POROS PERSATUAN NASIONAL

Dan jang sangat penting pula diperhatikan jalah bahwa kalau Bung Karno menamakan Pantja Sila sebagai alat pemersatu, jang dimaksudkan djustru jalah alat pemersatu antara tiga aliran besar jang hidup didalam masjarakat Indonesia, jaitu Nasionalisme, Agama dan Komunisme, atau jang dipersatukan dalam istilah NASAKOM. NASA-

KOM djuga merupakan bagian daripada filsafat persatuan atau filsafat Gotongrojong Rakjat Indonesia sebab, seperti dikatakan oleh Bung Karno (djuga dalam pidato Resopim, hal. 39-40) „Nasakom adalah kenjataan[2] hidup jang ta' dapat dibantah ... didalam masjarakat Indonesia". Gagasan Nasakom mempunjai akar-sedjarahnja sedjak lahirnja perdjuangan kemerdekaan nasional, perdjuangan revolusioner Rakjat Indonesia sedjak tahun[2] duapuluhan. Hal ini dibuktikan antara lain oleh tulisan Bung Karno dalam tahun 1926 jang berdjudul *„Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme"* (*Dibawah Bendera Revolusi* hal. 1-23). Sedjarah gerakan kemerdekaan Indonesia adalah sedjarah berkembangnja tiga aliran ini, sedjarah persatuan antara tiga aliran ini. Dan sedjarah itu membuktikan bahwa selama tiga aliran itu bersatu, maka djalannja gerakan revolusioner kita lantjar, sedangkan djika tiga aliran itu terpetjah, maka gerakan revolusioner kita berdjalan seret. NASAKOM adalah poros daripada front persatuan nasional kita. Menerima Pantja Sila harus menerima Nasakom. Mengenai hal ini Bung Karno telah berkata dalam pidato Re-so-pim sbb. :

„Siapa jang setudju kepada Pantjasila, harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM sebenarnja tidak setudju kepada Pantjasila. Sekarang saja tambah. Siapa setudju kepada Undang[2] Dasar '45 harus setudju kepada NASAKOM, siapa jang tidak setudju kepada NASAKOM sebenarnja tidak setudju kepada Undang[2] Dasar '45". (*Resopim,* hal.

40). Kutipan ini benar[2] menggambarkan kesatuan jang mutlak antara Revolusi '45 jang mendjiwai Undang[2] Dasar '45 dengan Pantjasila dan Nasakom. Memang durhaka atau sinting orang[2] jang sampai sekarang tetap tidak mengerti atau tidak mau mengerti kebenaran jang sedemikian sederhana ini.

DUA TAHAP REVOLUSI INDONESIA

Selandjutnja, djika kita mau mengerti setjara mendalam mengenai strategi umum Revolusi Indonesia, kita harus mengerti bukan hanja mengenai sasaran pokoknja, mengenai tugas-kewadjibannja, mengenai kekuatan sosialnja, tetapi harus djuga kita mengerti bahwa Revolusi Indonesia adalah revolusi jang berdjalan melalui dua tahap. Soal ini sebenarnja sudah djelas dari Manipol sendiri, kemudian diperdjelas lebih landjut oleh Bung Karno didalam pidato Djarek, dan penegasan jang paling lengkap dikemukakan didalam Deklarasi Ekonomi (Dekon) dalam hubungan dengan strategi dasar ekonomi Indonesia. Disitu dikatakan bahwa :
„Perlu disadari dan difahami bahwa strategi dasar ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari strategi umum revolusi Indonesia" dan bahwa *„Menurut strategi dasar ekonomi Indonesia maka dalam tahap pertama kita harus membangun susunan ekonomi jang bersifat nasional dan demokratis, jang bersih dari sisa[2] imperialisme dan bersih dari sisa[2] feodalisme. Tahap pertama ada-*

lah persiapan untuk tahap kedua, jaitu tahap ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia, tanpa l'exploitation de l'homme par l'homme" (*Dekon*, fasal 3). Dekon djuga mengatakan dalam fasal 4 bahwa *„Kita sekarang berada dalam tahap pertama Revolusi kita"*.

Dengan penegasan jang demikian, maka Dekon setjara ilmiah mengupas segi jang mutlak daripada Revolusi kita. Ia mengupas setjara kongkrit djalan jang harus dilalui untuk bisa sampai kepada tudjuan kita, jaitu masjarakat Sosialis Indonesia. Mengapa tahap nasional-demokratis itu harus dilalui dan diselesaikan sebelum bisa mulai dengan pembangunan ekonomi Sosialis? Tidak bisa diharapkan bahwa dalam masjarakat dimana masih terdapat sisa² imperialisme, artinja masjarakat jang belum merdeka penuh, dan masih terdapat sisa² feodalisme, akan terbuka kemungkinan untuk membangun Sosialisme. Tidak ada hal jang lebih dibentji oleh kaum imperialis daripada Sosialisme; djadi dengan sendirinja sisa² imperialisme merupakan halangan terpenting bagi Sosialisme. Inilah sebabnja mengapa sisa² itu harus dibersihkan dulu; inilah sebabnja mengapa masjarakat atau ekonomi nasional jang bersih dari sisa² imperialisme harus dibangun lebih dulu, baru bisa dimulai pembangunan masjarakat atau ekonomi Sosialis.

Demikian pula, sisa² feodalisme djuga merupakan rintangan mutlak terhadap pembangunan Sosialisme. Tak mungkin samasekali dibajangkan bahwa didalam masjarakat dimana tanah, salah-

satu alat produksi terpenting, masih dimiliki setjara monopoli oleh tuantanah², dimana kerdja-lebih atau hasil-lebih daripada kaum tani dirampas oleh tuantanah², akan terbuka kemungkinan untuk melaksanakan pembangunan Sosialis. Tuntutan kaum tani akan tanah harus dipenuhi lebih dulu supaja kaum tani sendiri bisa dimobilisasi untuk ikut membangun ekonomi jang madju, jang berindustri, sehingga sektor pertanian dan perkebunan dapat mendjadi dasar jang kokoh djustru karena tenaga² produktif telah dibebaskan dari hubungan-hubungan produksi jang bersifat feodal itu, telah dibebaskan dari penghisapan feodal.

Djadi, sifat ilmiah rumusan Dekon tentang adanja dua tahap revolusi itu terletak dalam kenjataan bahwa ia menundjukkan djalan untuk mentjapai Sosialisme jang merupakan haridepan atau perspektif dari Revolusi Indonesia. Djustru karena Sosialisme merupakan perspektif revolusi kita, maka tahap nasional dan demokratis atau tahap menghantjurkan imperialisme dan sisa² feodalisme harus dilalui lebih dahulu.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN MASJARAKAT SOSIALIS DAN MASJARAKAT KOMUNIS

Masih ada satu hal lagi jang perlu saja djelaskan dalam hubungan ini. Ada orang jang merasa tjuriga djika mendengar orang Komunis berbitjara tentang pembangunan masjarakat Sosialis karena mengira bahwa ini suatu tipu-muslihat; sebenarnja, kata mereka, kaum Komunis bukan mau mem-

bangun masjarakat Sosialis melainkan masjarakat Komunis. Seakan-akan masjarakat Komunis berlainan samasekali dengan masjarakat Sosialis, bahkan seakan-akan bertentangan! Anggapan jang demikian adalah samasekali keliru, karena walaupun memang ada perbedaan tertentu antara dua matjam masjarakat itu, namun kedua-duanja itu sesungguhnja merupakan satu tjara produksi, satu djenis susunan masjarakat. Dua²nja merupakan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Bedanja jalah, bahwa masjarakat Sosialis merupakan tingkat pertama dimana taraf produksi belum mentjukupi untuk memenuhi setjara ber-limpah² semua kebutuhan manusia. Djadi distribusi hasil² produksi diatur sesuai dengan sumbangan masing² orang didalam masjarakat terhadap usaha² produktif atau dengan perkataan lain: *„Setiap orang bekerdja menurut kesanggupannja, setiap orang menerima menurut hasil kerdjanja"*. Sedangkan dalam masjarakat Komunis, jang hanja mungkin ditjapai sesudah selesai pembangunan Sosialisme, tingkat produksi telah sedemikian tinggi sehingga semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Dalam masjarakat jang demikian, masing² orang menjumbangkan kepada usaha² produktif menurut kemampuannja sedangkan distribusi hasil² produksi sepenuhnja disesuaikan dengan kebutuhan² masing² orang atau dengan perkataan lain: *„Setiap orang bekerdja menurut kesanggupannja, setiap orang menerima menurut kebutuhannja"*.

Dengan demikian, masjarakat Sosialis merupa-

kan masjarakat jang adil dalam arti masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, tetapi belum makmur atau belum begitu makmur. Sedangkan masjarakat Komunis merupakan masjarakat jang adil *dan* makmur; adil karena tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia, dan makmur karena taraf produksi jang sudah ditjapai adalah sangat tinggi, produksi barang² sudah berlimpah².

PEMILIKAN PERSEORANGAN ATAS ALAT² PRODUKSI SUMBER PENGHISAPAN

Karena masjarakat Sosialis merupakan perspektif Revolusi Indonesia, maka dengan sendirinja kita sering berbitjara tentang masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Bung Karno ber-ulang² menekankan kepada prinsip ini karena memang inilah hakekat masjarakat Sosialis. Tapi sajangnja, ternjata bahwa masih ada sadja orang jang tidak mengerti apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Mereka tidak mengerti hal ini karena pada pokoknja mereka tidak mengerti hakekat daripada penghisapan atas manusia oleh manusia itu sendiri. Penghisapan, atau dalam kata² lain, *perampasan oleh seseorang terhadap hasil-lebih atau kerdja-lebih orang lain*, timbul dari hubungan produksi, artinja dimana satu fihak memiliki alat² produksi dan fihak jang lain tidak memiliki alat² produksi. Dengan adanja hubungan produksi ini, maka fihak jang memiliki

alat² produksi dapat merampas hasil-lebih atau kerdja-lebih dari fihak jang tidak memilikinja jang terpaksa mengadakan hubungan kerdja dengan pemilik² alat² produksi itu.

Dalam masjarakat perbudakan, pemilik budak memiliki manusia lain sedangkan budak² tidak memiliki apa², pun tidak memiliki djiwa-raganja sendiri, sehingga seluruh hasil-kerdja sibudak itu dirampas, dan hanja sedikit dikembalikan kepadanja sekedar agar supaja djangan sampai dia lekas mati. Dalam masjarakat feodal, tuantanah memiliki tanah sedangkan kaum tani-hamba tidak memiliki apa², sehingga tuantanah dapat memaksa kaum tani untuk bekerdja ditanahnja dengan menjerahkan semua hasil-lebih kepada tuantanah dalam bentuk sewa-tanah. Dalam masjarakat kapitalis, alat² produksi dimiliki seluruhnja oleh kaum kapitalis sehingga mereka bisa memaksa kaum buruh jang tidak memiliki alat² produksi apapun untuk bekerdja baginja sehingga kaum kapitalis dapat merampas kerdja-lebih jang dihasilkan oleh kaum buruh itu. Pada tingkat perkembangan tenaga² produktif dewasa ini manusia jang bekerdja selalu dapat menghasilkan sesuatu jang nilainja melebihi nilai daripada tenaga kerdja manusia itu sendiri. Bagian jang melebihi nilai tenaga kerdjanja sendiri berbentuk kerdja-lebih atau hasil-lebih, jang oleh Marx dinamakan nilai-lebih (surplus value, mehrwert), dan inilah jang dirampas oleh mereka jang memiliki alat² produksi.

Djadi, hakekat daripada penghisapan atas manusia oleh manusia jalah bahwa satu fihak me-

miliki alat² produksi sedangkan fihak lain tidak. Hakekatnja jalah pemilikan perseorangan atas alat² produksi. *Hanja masjarakat dimana sudah tidak terdapat lagi pemilikan perseorangan atas alat² produksi, artinja dimana alat² produksi dimiliki oleh masjarakat seluruhnja, oleh negara, dimana alat² produksi mendjadi milik Rakjat pekerdja, bisa bebas dari penghisapan atas manusia oleh manusia.* Djika alat² produksi dimiliki oleh masjarakat (pemilikan sosial), maka hasil-lebih atau kerdja-lebih akan dipergunakan oleh masjarakat itu sendiri dan sebagian akan dibagi kembali melalui distribusi pendapatan nasional sedangkan bagian selebihnja dipergunakan untuk memperluas tingkat produksi agar bisa mentjapai kesedjahteraan materiil dan spirituil jang lebih tinggi dikemudian hari. Hanja dalam masjarakat tanpa pemilikan perseorangan terhadap alat² produksi dapat ditjapai distribusi pendapatan nasional jang adil, artinja tanpa rampasan nilai-lebih, tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Inilah hubungan mutlak antara masjarakat adil dengan masjarakat tanpa penghisapan atas manusia oleh manusia. Djika masih terdapat pemilikan perseorangan atas alat² produksi, maka akan terdapat pula penghisapan atas manusia oleh manusia.

Tentu, kalau saja bitjara tentang pemilikan perseorangan saja selalu tekankan bahwa jang dimaksudkan jalah pemilikan atas *alat² produksi*. Pemilikan barang² pribadi, jang dipergunakan untuk konsumsi sendiri, dengan sendirinja tidak membuka kemungkinan untuk adanja penghisap-

an; djadi pemilikan perseorangan terhadap barang[2] jang demikian tidak berlawanan dengan prinsip „tanpa penghisapan" itu.

UNTUK MENGERTI SOSIALISME, PELADJARI MARXISME !

Baru beberapa hari jang lalu, jaitu pada tanggal 9 Djuli, 1963, Presiden Sukarno, ketika bitjara dimuka para mahasiswa Universitas Indonesia, menekankan bahwa djika kita mau membangun Sosialisme, kita harus membatja „Das Kapital"-nja Karl Marx, dan paling sedikit „Manifesto Komunis" karjanja Marx dan Engels. Saran Bung Karno sungguh tepat sekali, sebab didalam buku[2] itulah akan dapat kita mengetahui apa jang sebenarnja dimaksudkan dengan masjarakat Sosialis. Ulasan saja diatas jalah djustru adjaran Karl Marx didalam buku[2] jang disebut oleh Bung Karno itu.

Memang benar, kalau kita bertudjuan membangun Sosialisme, kita harus mempeladjari Marxisme. Kalau jang mau dibangun jalah kapitalisme, maka jang harus dipeladjari dan diamalkan bukan Marxisme, tetapi adjaran[2] Alfred Marshall, Lord Keynes, dan lain[2] ahli[2] ekonomi sematjam itu. Tetapi tudjuan kita bukanlah kapitalisme melainkan Sosialisme dan seperti baru[2] ini dikatakan oleh Menteri Luar Negeri, Dr. Subandrio, tak mungkin kita sekaligus anti-kapitalisme dan anti-Marxisme, sebab setjara objektif anti-Marxisme berarti membantu kapitalisme sedang-

kan Marxisme berarti menolak dan mengalahkan kapitalisme dan membangun Sosialisme.

Sebelum saja mengachiri bagian pertama dari tjeramah ini, saja ingin mengupas setjara singkat beberapa hal jang berhubungan dengan masalah negara. Hal ini saja anggap penting karena Angkatan Laut R.I., ber-sama² dengan Angkatan Bersendjata lainnja, adalah salahsatu dari alat² negara, dan bahkan sering dikatakan alat revolusi. Alat² negara harus mengerti politik karena alat² negara, seperti kita semua, harus dipimpin oleh politik. Tapi tidak hanja itu. Alat² negara harus pula mengerti tentang negara karena mereka merupakan sebagian daripada negara.

KEKUASAAN NEGARA HARUS SEPENUHNJA DITANGAN KAUM REVOLUSIONER

Negara adalah alat daripada golongan jang berkuasa didalam masjarakat untuk melakukan kekuasaannja itu. Djadi, negara adalah alat klas. Seperti telah saja djelaskan, revolusi ditudjukan untuk mengubah hubungan² produksi, jaitu untuk mengubah susunan ekonomi, susunan masjarakat. Djika klas atau klas² (dalam hal negeri kita, seluruh Rakjat jang anti-imperialis) jang sedang berevolusi berhasil memegang kekuasaan itu, maka negara akan dapat mengabdi sepenuhnja kepada revolusi itu. Hanja djika kekuasaan negara berada didalam tangan kaum revolusioner, baru kita dapat berkata tentang negara sebagai alat revolusi. Tetapi djika negara masih dikuasai oleh

klas² jang menentang revolusi, oleh kaum reaksioner, maka negara menghambat revolusi atau mendjadi alat kontra-revolusi.

Seperti kita sama² mengetahui, negara Republik Indonesia lahir dalam perdjuangan revolusioner, djadi seharusnja mengabdi kepada revolusi. Tetapi seperti kita sama² mengetahui, revolusi Indonesia belum selesai walaupun sudah hampir 18 tahun sedjak Proklamasi Negara Republik Indonesia. Pengalaman² kita memang menundjukkan bahwa negara kita tidak selalu atau tidak seluruhnja mengabdi kepada revolusi. Seandainja ia selalu atau seluruhnja mengabdi kepada revolusi, sudah tentu revolusi kita sudah lama selesai.

Tetapi sebaliknja, negara kita itu djuga tidak selalu atau seluruhnja menghambat revolusi. Samasekali tidak. Djadi, ada *dua segi* dalam kekuasaan negara Republik kita, jaitu ada segi pro-Rakjat tapi ada djuga segi anti-Rakjat. Segi pro-Rakjat mendorong dan mengabdi kepada revolusi, sedangkan segi anti-Rakjat menghambat revolusi. Ini berarti bahwa djika kita mau membikin negara Republik kita sepenuhnja dan selalu mengabdi kepada revolusi — dan memang itulah jang harus mendjadi tudjuan setiap orang revolusioner — maka segi anti-Rakjat harus dilenjapkan dan segi pro-Rakjat harus dimenangkan. Ini berarti, kita harus melenjapkan segi kontra-revolusioner dan memenangkan segi revolusioner. Tudjuan ini harus ditjapai antara lain melalui rituling aparat negara. Dengan demikian rituling adalah satu tugas revolusioner, satu keharusan, sesuatu jang mutlak perlu djika revolusi kita mau diselesaikan.

RITULING MUTLAK PERLU UNTUK REVOLUSI-KOMPLIT

Seperti dikatakan oleh Bung Karno dalam pidato Djarek (17 Agustus, 1960), rituling aparat negara harus ditudjukan kepada *„orang² jang otak dan hatinja telah berdaki berkarat tak dapat menjesuaikan diri dengan Manipol-Usdek. Sungguh alat² jang lama itu harus kita ritul".* (*Tubapi*, hal. 211). Artinja rituling harus ditudjukan kepada orang jang tak dapat menjesuaikan diri dengan revolusi kita. Rituling jang demikian, kata Bung Karno dalam Djarek, adalah bagian dari *„Revolusi-Komplit jang kita lakukan, jaitu Revolusi penuh dari atas dan dari bawah".* Djadi, tanpa rituling aparat negara, Revolusi Indonesia tidak bisa komplit.

Dan apa jang dimaksudkan oleh Bung Karno dengan *„revolusi dari atas dan dari bawah"?* Saja kutip lagi dari pidato Djarek itu, sbb.: *„Dari atas, dengan adanja rituling terhadap aparat dan sistim; dari bawah, karena rituling aparat negara dan sistim itu dilakukan sesuai dengan desakan Rakjat dan didukung pula oleh Rakjat.* (*Tubapi*, hal. 241).

Desakan Rakjat Indonesia pada saat ini agar kegotongrojongan nasional jang berporoskan NASAKOM ditjapai disemua bidang, termasuk pula dibidang exekutif, jalah desakan jang sepenuhnja sesuai dengan apa jang dinamakan oleh Bung Karno sebagai rituling jang merupakan bagian mutlak daripada Revolusi-Komplit kita.

Demikianlah, beberapa hal jang ingin saja sampaikan pada kesempatan ini mengenai politik. Saja sengadja membahas masalah ini agak pandjang dan memberi perhatian kepada hal² jang bisa dikatakan sangat pokok, hal² jang bahkan bersifat elementer. Kadang² hal jang elementer dalam kenjataan sering tidak dimengerti atau pura² tidak dimengerti, pun oleh orang² jang membanggakan dirinja sebagai orang² politikus jang hebat, sehingga akibatnja, semua hal jang bersangkutan dengan revolusi mendjadi kabur dan meleset. Tidak salah kiranja kalau dari waktu kewaktu kita kembali kepada soal² jang elementer itu untuk membikin segar kembali pengertian kita tentang revolusi kita.

II. BEBERAPA SOAL TENTANG PERTAHANAN

Djika hal² mengenai politik sudah djelas, tidak akan sulit kiranja untuk mengadakan pembahasan tentang masalah pertahanan. Sama halnja seperti di-bidang² lain, djuga dibidang pertahanan politik memegang peranan memimpin, politik adalah djenderal. Kita harus dipimpin oleh politik. Untuk kita di Indonesia, ini berarti bahwa pertahanan nasional kita harus dipimpin oleh Manifesto Politik karena itulah politik kita, politik revolusi kita. Pertahanan jang didjalankan oleh Angkatan Bersendjata Republik Indonesia mempunjai tugas pokok untuk menjelamatkan dan memenangkan Revolusi. Oleh karena itu, Angkatan Bersendjata RI harus diatas segala-galanja berdiri difihak Rakjat. Angkatan Bersendjata RI harus konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal. Pertahanan nasional RI harus konsekwen anti-imperialis dan anti-feodal.

DWITUNGGAL ANGKATAN BERSENDJATA DAN RAKJAT UNTUK REVOLUSI

Sudah sedjak lama kaum Komunis Indonesia menjerukan dan mendjundjung tinggi sembojan: *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat.* Hal ini menggambarkan hakekat daripada hubungan pertahanan dengan politik. Gagasan dwitung-

gal ini bisa didjelaskan pula sebagai hubungan antara ikan dengan air. Airnja adalah Rakjat. Sudah djelas, ikan tak mungkin hidup diluar air. Tetapi djuga didalam air, djika airnja beratjun, ikan tidak bisa hidup. Bagi Angkatan Bersendjata, Rakjat jang terpetjahbelah adalah bagaikan air beratjun bagi ikan. Oleh karena itu sembojan *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* hanja bisa mendjadi realitet djika semua fihak tanpa perketjualian mendjaga air itu supaja bersih, bersih dari segala matjam ratjun jang berupa Komunisto-phobi, massa-phobi dll.

Sembojan *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* sebenarnja sudah lama mendjadi sembojan populer di Indonesia. Tapi harus kita akui bahwa sembojan itu tidak selalu diberi pengertian jang tegas dan benar. Ada orang jang mengira bahwa *Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat* atau hubungan ikan dengan air bisa diwudjudkan djika Angkatan Bersendjata „hidup di-tengah² Rakjat". Hal ini sudah tentu sangat penting, sebab Angkatan Bersendjata jang mendjadi bagian daripada revolusi Rakjat benar² harus mendjadi bagian takterpisahkan dari Rakjat itu. Tetapi djangan kita membatasi hubungan dwitunggal ini kepada sekedar „hidup di-tengah² Rakjat". Maksudnja djauh lebih mendalam lagi, jaitu Angkatan Bersendjata harus *terdiri dari Rakjat, mengabdi kepada Rakjat dan berdjuang untuk Rakjat.* Ini tak lain berarti bahwa Angkatan Bersendjata harus mengabdi kepada revolusi dan berdjuang untuk revolusi, artinja tunduk kepada

strategi umum Revolusi Indonesia.

Mengenai hal ini Presiden Sukarno berkata sbb. dalam pidato Re-so-pim: *„Mereka* (artinja Angkatan Bersendjata, DNA) *adalah alat Revolusi, mereka adalah Angkatan-Bersendjatanja Revolusi. Mereka harus setia kepada sumbernja, jaitu Revolusi, jaitu Rakjat. Mereka harus mengabdi kepada Rakjat, mendahulukan kepentingan Rakjat daripada kepentingan lain². Mereka ta' boleh melukai perasaan Rakjat, mereka harus mendjadi Angkatan Bersendjata jang disukai dan ditjintai Rakjat .... Bedil ditangan Angkatan Bersendjata harus ibarat bedil ditangan Rakjat, untuk melindungi hak² Rakjat dan untuk mempertahankan Negaranja Rakjat dan Revolusinja Rakjat. Dalam Revolusi kita sekarang ini, dan seterusnja, tidak boleh ada pertentangan atau kontradiksi antara Angkatan Bersendjata dan Rakjat!"* (*Re-so-pim,* hal. 37-38)

Djadi, ini semua bukan sekedar suatu hubungan jang harus diadakan diantara Angkatan Bersendjata dengan Rakjat. Ini harus mendjadi doktrin Angkatan Bersendjata jang mendjiwai seluruh aparat pertahanan kita.

Angkatan Laut kita jang sudah memainkan peranan jang vital dalam perdjuangan untuk menumpas pemberontakan PRRI-Permesta dan jang telah setjara berani mengambil bagian dalam perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat dari pendjadjahan Belanda, telah setjara njata mengabdi kepada Rakjat dan berdjuang untuk Rakjat.

Pradjurit² ALRI tak lain tak bukan adalah anak² Rakjat, terutama kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, dsb. Bintara² dan perwira² ALRI djuga pada umumnja berasal dari Rakjat.

Pengertian tentang doktrin Angkatan Bersendjata seperti saja kemukakan diatas sudah saja adjukan pula beberapa minggu jang lalu ketika saja berbitjara dimuka Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD). Memang, menurut pendapat saja, soal doktrin ini adalah sama untuk semua Angkatan Bersendjata kita. Hanja djika semua Angkatan Bersendjata didjiwai oleh satu doktrin dapat kita berbitjara tentang adanja satu doktrin pertahanan nasional, tentang adanja pertahanan nasional jang mengabdi kepada revolusi. Ini merupakan satu²nja dasar jang kokoh untuk mentjapai kesatuan dan kordinasi jang efektif dan stabil antara keempat Angkatan Bersendjata kita.

Karena letak dan susunan geografisnja, Indonesia memerlukan pertahanan baik didarat, dilaut maupun diudara. Kesatuan dan kordinasi jang efektif dan sikap hormat-menghormati antara keempat Angkatan Bersendjata, merupakan hal jang sungguh menentukan sekali. Tak dapat dibenarkan djika terhadap salahsatu Angkatan diberikan kedudukan lebih tinggi atau lebih rendah.

JANG PRIMER POLITIK, BUKAN GEOGRAFI

Sistim pertahanan nasional negeri kita, seperti halnja untuk setiap negeri, sudah dengan sendirinja tidak bisa dilepaskan dari letak dan susunan

geografis negeri kita. Hal[2] itu mempunjai konsekwensi[2] jang penting bagi struktur pertahanan nasional. Negeri kita terletak dipersimpangan djalan antara dua samudera, dan seakan-akan mendjadi batu lontjatan antara daratan Asia dengan Australia. Tapi hal letak ini bukan hanja masalah ilmu bumi melainkan pula masalah politik karena seperti kita ketahui negara[2] tetangga kita jang paling dekat atau negeri[2] jang menguasai lautan jang mengelilingi kita adalah negara[2] jang terikat, langsung atau tidak, dengan SEATO, itu pakt agresif imperialis jang didirikan oleh kaum imperialis AS. Karena ini, Indonesia selamanja menghadapi tekanan[2] jang sangat kuat untuk mengubah politik luarnegerinja jang tegas anti-imperialis dan untuk menggabungkan diri dengan SEATO.

Susunan geografis negeri kita sebagai negeri kepulauan jang sangat luas djuga mempunjai arti jang besar karena mengharuskan kita untuk memberikan tekanan jang istimewa pada kebutuhan memelihara dan memperkuat hubungan[2], baik dilaut maupun diudara, antara pulau[2] seluruh tanahair. Tapi hal bentuk dan luas inipun bukan hanja masalah ilmu bumi, melainkan pula masalah politik, karena kaum reaksi dan kontra-revolusi selalu berusaha mempergunakan fakta ini untuk maksud[2] djahat mereka dalam menggerowoti kesatuan negeri kita.

Pandangan jang saja kemukakan ini hendaknja djangan disamakan dengan pandangan geo-politik jang terkutuk itu. Letak dan bentuk geografis negeri kita harus diperhatikan dan dipergunakan

dengan sebaik-baiknja dengan tudjuan pokok *untuk mengabdi kepada revolusi.* Djadi, jang pertama² adalah revolusi, bukan geografi. Pandangan geo-politik sebaliknja mendasarkan segala sesuatu kepada letak dan susunan geografis sesuatu negeri. Pada azasnja, pandangan geo-politik, jaitu penggunaan ilmu bumi untuk menentukan strategi dan politik, bertudjuan membenarkan expansi bagi negara² imperialis dan sebaliknja bagi negara² jang mendjadi objek expansi imperialis itu geo-politik bertudjuan membenarkan kapitulasi atau politik-menjerah kepada expansi imperialis itu. Karena itu, geo-politik sepenuhnja merupakan pandangan jang mengabdi kepada imperialisme.

Salahsatu exponen utama pandangan geo-politik ini jalah *Sir Halford John MacKinder* (1861-1947) seorang ahli ilmu bumi Inggris. Menurut teori MacKinder siapa jang berhasil menguasai apa jang dia namakan „bulan sabit luar" (outer crescent), jaitu kepulauan² jang berdekatan dengan pantai daratan-luas Eropa-Asia (Inggris sendiri, Lautan Tengah, kepulauan² dilautan Hindia, kepulauan Indonesia, Filipina sampai ke Djepang), dan djuga dapat menguasai apa jang dinamakan „bulan sabit dalam" (inner crescent), jaitu negara² jang terletak ditepi daratan-luas Asia-Eropa itu (termasuk Eropa, Timur Tengah, India, dan Tiongkok) akan berhasil pula menguasai apa jang dia namakan „daerah poros", „daerah-djantung" atau „heartland", jaitu Rusia (sekarang Uni Sovjet), dan akan djuga berhasil menguasai seluruh dunia.

Pandangan geo-politik djuga diperkembangkan

oleh seorang militeris Djerman, *Karl Haushofer* (1869-1946) seorang inspirator utama politik expansionisme kaum fasis Djerman. Berdasarkan suatu pembagian dunia jang setjara se-wenang[2] dia mendesak supaja dunia ditempatkan dibawah kekuasaan Djerman dan Djepang.

Kaum militeris Amerika Serikat djuga sangat sibuk dengan memperkembangkan pandangan geo-politik, misalnja *Nichols Spykman*, jang djustru banjak mempergunakan teori MacKinder untuk mengilhami politik agresi imperialis Amerika Serikat guna mengepung Uni Sovjet, negeri Sosialis pertama didunia, dengan pangkalan[2] perang dan guna berusaha menghantjurkan negeri Sosialis itu.

PANDANGAN GEO-POLITIK BERTENTANGAN DENGAN PANDANGAN REVOLUSIONER

Indonesia harus mempunjai strategi dan politik jang tegas didasarkan pada kebutuhan[2] revolusi kita. Pandangan[2] geo-politik samasekali tidak boleh diberi tempat dalam rangka teori pertahanan nasional negeri kita, ataupun dalam menentukan politik luarnegeri kita. Kontradiksi jang sangat tadjam antara pandangan geo-politik dengan pandangan revolusioner terhadap doktrin pertahanan dapat dirasakan dengan djelas sekali djika kita membatja buku Djenderal Major Simatupang, *Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai*. Djenderal Major ini djelas mendjadikan dirinja seorang exponen geo-politik dengan mengatakan bahwa : *„pengaruh faktor ilmu bumi dalam politik*

suatu negara pada pokoknja adalah lebih kuat daripada faktor ideologi". (hal. 132). Lebih kuat dari faktor ideologi tidak bisa lain djuga berarti lebih kuat dari faktor politik. Geo-politik bisa sangat membahajakan negara dan revolusi kita karena, berdasarkan pandangan jang demikian, ada sadja orang² jang berusaha mendjiwai politik nasional dan internasional kita dengan sikap menjerah, sikap takut, sikap jang melihat semua perkembangan se-akan² sebagai perkembangan politik kekuasaan, dan oleh karenanja akan menempatkan kita hanja pada satu kemungkinan, jaitu menjesuaikan diri dengan perebutan kekuasaan ('perang dingin') ini. Dapat kita membatja, misalnja, didalam bukunja Djenderal Major Simatupang itu, bahwa *„dunia masih tetap dikuasai oleh politik kekuasaan, oleh ketakutan untuk dikepung dan diserang, sehingga semuanja merasa dirinja terpaksa untuk mengadakan persekutuan jang harus mengimbangi bahaja serangan jang dichawatirkan"*. (hal. 143). Dari sini djelas sekali bahwa bagi negeri jang mendjadi objek politik expansi, seperti Indonesia, geopolitik dipergunakan untuk menimbulkan rasa-takut, rasa-menjerah, dan lebih dari itu, untuk membenarkan persekutuan² atau blok² militer jang agresif dan bahkan guna membenarkan supaja Indonesia ikut didalam sesuatu blok itu.

Setjara praktis, sikap ini tentu membawa mereka jang bersikap demikian kepada kesimpulan² tentang politik luar dan dalamnegeri jang sangat bertentangan dengan politik kita berdasarkan haluan negara kita, Manifesto Politik. Pandangan

geo-politik Djenderal Major Simatupang membawanja kepada kesimpulan² tentang politik luarnegeri kita sbb. :

„Apa jang dapat kita djalankan ialah berusaha, agar diantara negara² didaratan Asia dan kita sendiri selalu terdapat persahabatan dan agar suasana dalam hubungan negara² didaratan Asia itu dengan kita dan diantara mereka djangan sampai diliputi oleh semangat politik kekuasaan, melainkan oleh semangat saling hormat-menghormati terhadap kedaulatan masing²" (hal. 149). Politik jang demikian samasekali memisahkan politik luarnegeri kita dari tudjuan Revolusi Indonesia. Dasar² politik luarnegeri Republik Indonesia sudah terang anti-imperialisme, anti neo-kolonialisme dan properdamaian, atau menurut kerangka ketiga Manipol : *„persahabatan baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara² Asia-Afrika, atas dasar hormat-menghormati dan atas dasar bekerdjasama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian Dunia jang sempurna".* (*Tubapi*, hal. 81).

PANDANGAN GEO-POLITIK MENGEBIRI POLITIK LUARNEGERI KITA JANG ANTI-IMPERIALIS

Pandangan geo-politik mengebiri politik luarnegeri kita karena *meniadakan tjiri anti-imperialisnja* jang merupakan tjiri terpokok. Soal mendjadi tetangga, demikian pula soal persamaan ras atau berasal dari satu rumpun bangsa tidak bisa diper-

gunakan sebagai dasar bagi politik luarnegeri kita. Hendaknja hal ini diperhatikan benar dalam menghadapi usaha² jang sedang dilakukan untuk mentjapai kerdjasama jang berbentuk suatu konfederasi jang dinamakan Maphilindo. Sudah djelas, bahajanja jalah bahwa dasar „tetangga", „satu ras" atau „berasal dari satu rumpun bangsa" berarti mengebiri politik konfrontasi kita terhadap komplotan agresif kaum imperialis dengan kaum reaksioner Malaya untuk mendirikan suatu federasi Malaysia jang neo-kolonialis. Ia djuga berarti mengebiri politik dukungan penuh "as a matter of principle" terhadap perdjuangan kemerdekaan Rakjat Kalimantan Utara jang telah menjatakan hak menentukan nasib sendiri dengan memproklamasikan Negara Kesatuan Kalimantan Utara pada tanggal 8 Desember 1962. Penegasan kembali oleh Bung Karno beberapa hari jang lalu didalam resepsi penutupan Kongres Partai Katolik dan kemudian dihadapan para perwira SESKOAD tentang politik konfrontasi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia setjara logis berarti bahwa sudah lebih tidak ada dasar untuk melandjutkan KTT Tiga Negara jang direntjanakan di Manila tanggal 30 Djuli nanti.

Bahwasanja pandangan geo-politik mengakibatkan politik menjerah kepada agresi imperialis dapat pula kita lihat dari kesimpulan berikutnja jang ditarik oleh Djen-Major Simatupang dalam bukunja jang telah saja kutip diatas, dimana dia menulis selandjutnja bahwa *„sebagai negara maritim*

harus djuga kita usahakan hubungan persahabatan dengan negara² jang menguasai lautan disekitar negeri kita". (hal. 149). Kesimpulan ini sungguh suatu kesimpulan jang menimbulkan kemarahan dalam hati tiap² patriot Indonesia. Siapa negara² jang menguasai lautan disekitar negeri kita kalau bukan negara² SEATO ? Politik matjam apa ini, jang menetapkan bahwa kita harus bersahabat dengan negara² SEATO, dengan alasan bahwa mereka mengelilingi negeri kita ? Tak lain, ini politik kapitulasi. Padahal, djustru karena negara-negara SEATO mengelilingi kita, kita harus menganggap mereka sebagai musuh jang berbahaja. Bukankah sikap kapitulasi ini suatu tantangan tegas terhadap sikap Rakjat Indonesia jang sudah sedjak dahulu menolak untuk mengadakan persahabatan dengan SEATO, jang menolak dengan tegas untuk diseret kedalam blok SEATO jang imperialis dan agresif itu ?

KONSEPSI MARITIM KITA HARUS TEGAS REVOLUSIONER ANTI-IMPERIALIS

Kesimpulan Simatupang ini merupakan persoalan penting, terutama bagi Angkatan Laut kita karena djustru menjangkut kedudukan negeri kita sebagai *„negeri maritim"*. Apakah karena Indonesia adalah negeri maritim, maka ia harus bersahabat dengan SEATO ? Apakah karena Indonesia adalah negeri maritim, maka ALRI kita jang anti-imperialis harus mengadakan latihan² perang dengan angkatan laut negara² SEATO jang im-

perialis ?

Mari kita setjara singkat membahas soal kedudukan negeri kita sebagai negeri maritim. Apa sebenarnja jang dimaksudkan dengan sebutan itu ? Bagaimana menginterpretasikan pandangan jang demikian dalam rangka doktrin pertahanan nasional jang harus tunduk kepada strategi umum Revolusi Indonesia ? Bagaimana seharusnja konsepsi maritim jang revolusioner ?

Memang benar, Indonesia adalah negeri maritim dan harus mendjadi negeri maritim jang kuat. Tradisi ini sudah tertanam sedjak ber-abad² jang lalu dengan kepahlawanan Rakjat Indonesia dilautan luas, djauh sebelum kedatangan kaum kolonialis Belanda. Pelaut² kita dapat membanggakan tradisi nenek-mojang kita jang mentjapai prestasi jang tinggi dalam memelihara hubungan² laut dengan mengarungi samudera². Dapat kita ketahui pula bahwa zaman² kedjajaan dalam sedjarah negeri kita djustru terdjadi pada waktu keradjaan Sriwidjaja dan keradjaan Madjapahit jang keduaduanja mempunjai kekuatan dilaut dan dapat memelihara hubungan antar pulau jang baik. Tapi perlu diperhatikan pula bahwa keruntuhan keradjaan Sriwidjaja jang achirnja merosot mendjadi daerah teror badjaklaut disebabkan karena kekuatan dilaut tidak disertai perkembangan hubungan² didaratan.

Sebaliknja, kaum imperialis Belanda dulu dapat menundukkan negeri kita karena mereka berhasil mematahkan kekuatan kita dilaut dan mendesak keradjaan Mataram jang tidak mempunjai kekuatan dilaut.

KONSEPSI MARITIM IMPERIALIS TIDAK TJOTJOK BUAT INDONESIA

Letak dan susunan geografis negeri kita mengharuskan kita untuk mendjadikan Republik kita sebagai negara maritim. Tetapi dalam mengartikan sebutan ini, tidak benar djika kita mentjari dasarnja dalam konsepsi² maritim dari negara² imperialis seperti Inggris, Amerika dan Djepang.

Konsepsi maritim biasanja didasarkan pada teori² *Alfred Thayer Mahan* (1840-1914), seorang Admiral Amerika jang umumnja dianggap sebagai bapaknja konsepsi² maritim modern Inggris dan Amerika. Mahan berusaha membuktikan bahwa kedjajaan dilaut mempunjai pengaruh jang bersifat menentukan bagi perkembangan sedjarah dan ide²nja itu mengilhami pembangunan angkatan² laut AS dan Inggris dizaman imperialisme. Konsepsi jang demikian jang memang seluruhnja diabdikan kepada kepentingan² expansi imperialis seperti jang terbukti dari perkembangan² sedjarah sedjak permulaan abad ke-20 ini, sudah tentu tidak sesuai samasekali dengan kepentingan² kita, dimana konsepsi negara maritim mendjadi bagian integral daripada doktrin pertahanan nasional jang revolusioner dan anti-imperialis. Untuk Indonesia, kita wadjib menjusun konsepsi negara maritim jang sesuai dengan kepentingan² revolusi kita jang anti-imperialis, jang ditudjukan kepada menggunakan kekuasaan dilautan kita jang sangat luas untuk menjelamatkan Republik kita dari agresi² dari luar serta menghantjurkan kegiatan² kontra-

revolusi dan subversif dari dalam.

Pertama, konsepsi maritim negara kita harus ditudjukan untuk mempertahankan Negara Kesatuan kita, sesuai dengan kerangka pertama dari tiga kerangka Manipol. Bukankah mendjadi pengalaman kita jang pahit bahwa usaha untuk merongrong Negara Kesatuan kita selalu merupakan tudjuan pokok dari kaum kontra-revolusi, jaitu dengan gerakan² separatis, dengan usaha² untuk menguasai pulau² tertentu, dengan memutuskan hubungan² antara Rakjat disatu pulau dengan Rakjat dipulau lain dan dengan mempertentangkan „pusat" dengan „daerah²" ? Mendjaga keutuhan wilajah merupakan tugas vital dalam menghadapi kaum separatis, seperti telah dibuktikan oleh pengalaman² kita sewaktu pemberontakan PRRI-Permesta. Untuk itu pula, ALRI harus djuga menguasai kemahiran mendaratkan pasukan² diwilajah musuh dan mendjamin logistik jang terus-menerus.

Tidak kalah penting pula usaha² ALRI untuk mendjaga keselamatan armada niaga kita jang mempunjai tugas penting dalam memperbaiki keadaan ekonomi dan melantjarkan roda² perekonomian kita. Demikian pula, lautan² kita harus terus-menerus didjaga agar bersih dari penjelundupan jang sangat merugikan itu. Tugas² ini semua perlu diberi tempat dalam konsepsi maritim kita.

Kedua, konsepsi maritim negara kita harus bertudjuan memperkuat politik luarnegeri jang anti-imperialis, jaitu untuk mendjaga perbatasan² kita jang sedemikian pandjang itu terhadap serangan fihak imperialis dan dengan tegas menghadapi

blok imperialis SEATO dll. jang mengelilingi negeri kita serta memperkuat hubungan² dengan negara² the new emerging forces. Perkembangan² pada waktu achir² ini membuktikan bahwa kaum imperialis jang dikepalai oleh imperialis AS sedang memperhebat usaha²nja untuk membangun serangkaian pangkalan² disekitar kepulauan Indonesia. Maksud AS mendirikan pangkalan² Angkatan Laut di Australia Barat Daja dan membantu India mendirikan pangkalan² dikepulauan Andaman dan Nikobar harus diperhatikan benar² sebagai antjaman baru terhadap kemerdekaan nasional kita. sebagai usaha untuk „mengepung" gerakan kemerdekaan nasional di Asia Tenggara.

Politik luarnegeri Republik Indonesia jang anti-imperialis mendapat perwudjudannja dalam gagasan the new emerging forces jang telah diperkembangkan, terutama sedjak pidato jang diutjapkan oleh Bung Karno didalam Konferensi Negara² Non-Aligned dalam tahun 1961. Konfrontasi antara the new emerging forces (NEF) jang terdiri dari negara² sosialis, negara² baru merdeka jang anti-imperialis dan kekuatan² progresif lainnja diseluruh dunia, dengan the old established forces (OEF) jang terdiri dari negara² imperialis, negara² kolonialis, agen² mereka dimanapun djuga serta kekuatan² reaksioner lainnja diseluruh dunia sungguh merupakan suatu tantangan jang tegas terhadap pandangan geo-politik. Geo-politik bertudjuan mengabdi kepada politik expansi disatu fihak dan untuk mengabdi kepada politik kapitulasi (menjerah) difihak lain. Politik konfrontasi

antara the new emerging forces dan the old established forces bertudjuan menghimpun semua kekuatan² anti-imperialis untuk menggagalkan agresi dan intervensi imperialis, untuk menjokong perdjuangan kemerdekaan, untuk membela kemerdekaan nasional, untuk memperkuat negeri² sosialis dan untuk mentjapai perdamaian dunia.

PERTAHANAN RAKJAT, BUKAN "TERRITORIAL WAR"

Setelah memberikan uraian jang menjeluruh tentang beberapa hal jang berhubungan dengan teori pertahanan nasional, saja ingin dalam bagian terachir ini, menjoroti prinsip² pokok pertahanan nasional kita seperti telah ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 serta lampiran²nja. Ketetapan MPRS, fasal 4, ajat 4 dan 5 berbunji sbb. :

„Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandasan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta peperintjiannja dan berpangkal kepada kekuatan Rakjat dengan bertudjuan mendjamin keamanan/pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranja perdamaian dunia".

„Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan Rakjat semesta jang berintikan tentara sukarela dan milisi".

Bab III, ajat (41) dari Lampiran A daripada

Ketetapan MPRS tersebut jang mempunjai kekuatan sebagai *penjempurnaan* terhadap Garis² Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karja Depernas berbunji sbb. :

„Sebagai konsekwensi daripada bentuk dan sifat Keamanan/Pertahanan RI itu, maka Angkatan Perang Republik Indonesia turut serta menjelesaikan tuntutan² revolusi Nasional, dalam bidangnja masing²".

Selain menetapkan hubungan jang tegas antara sifat dan sikap pertahanan nasional kita dengan dasar² Revolusi serta pokok² politik luarnegeri kita jang telah didjelaskan setjara lebih terperintji diatas, ketentuan² MPRS ini memberi tekanan jang kuat kepada keharusan supaja politik keamanan/pertahanan negeri kita berpangkal kepada kekuatan Rakjat serta berdasarkan pertahanan Rakjat semesta. Tekanan² itu sepenuhnja sesuai dengan tradisi perdjuangan bersendjata negara serta Rakjat kita selama tahun² 1945 sampai 1948.

Prinsip² ini berarti bahwa Angkatan Bersendjata kita dibangun untuk dapat pada setiap waktu menjelenggarakan perang ber-sama² dengan Rakjat, jaitu pada hakekatnja, menjelenggarakan perang Rakjat. Ada teoritikus² militer jang menganggap bahwa *„perang rakjat berpokok kepada kelemahan dari suatu negara"* (lihat bukunja Djenderal Major Simatupang, hal. 173) jaitu mentjerminkan keterbelakangan suatu masjarakat agraris jang tidak mempunjai angkatan² bersendjata modern. Pandangan ini didasarkan pada tulisan² *Karl von Clausewitz* (1780-1831), seorang djenderal Pru-

sia, jang mentjerminkan kepanikan kaum junker Prusia terhadap pemberontakan[2] kaum tani melawan feodalisme dizaman revolusi burdjuis. Menurut pandangan jang diadjukan oleh Simatupang itu, djika Angkatan Bersendjata telah dapat dibangun setjara modern dilapangan ilmu pengetahuan, teknik dan perindustrian, maka perang Rakjat mendjadi hal jang tidak diperlukan lagi. Bahkan dia sependirian dengan *Liddell Hart,* penulis militer Inggris jang sangat menjesali perkembangan-perkembangan perang gerilja di-negeri[2] Eropa Timur karena telah mendjadi dasar kokoh bagi berdirinja negara[2] Sosialis disana, jang berpendapat bahwa perang Rakjat harus dielakkan karena *„meninggalkan akibat[2] jang berat"* (Simatupang, hal. 176).

Pandangan ini, jaitu jang mempertentangkan dasar[2] kerakjatan daripada sistim pertahanan nasional kita dengan usaha[2] untuk membangun Angkatan Bersendjata jang modern, tidak dibenarkan oleh Ketetapan MPRS jang baru saja kutip. Pandangan keliru ini didasarkan pada teori pertahanan jang diperkembangkan di Jugoslavia, terutama oleh seorang djenderal Jugoslavia, *Kveder* didalam tulisannja jang berdjudul "Territorial War" dan jang dimuat didalam madjalah Jugoslavia *Foreign Affairs,* bulan Oktober, 1953. Didalam tulisan itu, diusahakan untuk menggantikan tradisi[2] perlawanan Rakjat Jugoslavia (gerilja atau partisan), dimana Rakjat mengangkat sendjata untuk bertempur melawan musuh, dengan suatu sistim pertahanan jang berdasarkan kekuatan

bersendjata modern dimana kekuatan-kekuatan Rakjat hanja diberi peranan sekunder dalam keadaan dimana angkatan darat terpaksa mundur dan mendjalankan perlawanan diwilajah luas setjara ter-pentjar². Dalam sistim demikian, selandjutnja, prinsip bahwa semua Angkatan Bersendjata memegang peranan jang sama penting djuga dilanggar karena Angkatan Laut dan Angkatan Udara hanja dapat memegang peranan jang bersifat membantu.

Pembangunan Angkatan Bersendjata RI dengan peralatan jang serba modern seperti telah terdjadi selama beberapa tahun ini sangat dibanggakan oleh seluruh Rakjat Indonesia sebab dengan demikian kemungkinan menjelamatkan dan memenangkan revolusi kita sesuai dengan kehendak Rakjat mendjadi lebih pasti lagi. Dengan Angkatan Bersendjata jang modern dan dengan sistim pertahanan nasional jang „berpangkal kepada kekuatan Rakjat ... dan berdasarkan pertahanan Rakjat", seperti ditjantumkan dalam Ketetapan MPRS, tidak ada kekuatan didunia jang akan bisa melawan arus Revolusi Indonesia dan menghantjurkan Republik kita.

DJANGAN TJAMPURI BIDANG JANG BUKAN BIDANGNJA

Lampiran A daripada Ketetapan MPRS jang telah saja kutip diatas djuga menetapkan suatu prinsip jang amat penting, jaitu tentang kedudukan Angkatan Bersendjata didalam masjarakat di-

mana dikatakan bahwa „*Angkatan Perang RI turut serta menjelesaikan tuntutan*^{2} *revolusi Nasional dalam bidangnja masing*^{2}". Kalau kita mau berbitjara tentang kedudukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian Negara sebagai karjawan, maka sudah djelas setiap Angkatan itu sudah semestinja diberikan tempat diberbagai lembaga negara, sampai kepada lembaga^2 tertinggi, dibidang legislatif maupun eksekutif. Di-lembaga^2 itu, mereka mewakili bidang mereka masing^2 karena bidang^2 itu memainkan peranan jang vital bagi penjelesaian Revolusi kita dan sudah barang tentu ini akan memperkuat hubungan^2 diantara bidang^2 itu. Prinsip supaja masing^2 turut serta dalam pekerdjaan jang luhur ini setjara „gotong-rojong" harus mendjadi tjiri daripada usaha seluruh masjarakat Indonesia. Sesuai dengan ini, perlu dihindari usaha-usaha untuk mentjampuri bidang^2 lain jang bukan bidangnja Angkatan Bersendjata, karena ini dapat menimbulkan pertentangan^2 jang merugikan bagi kepentingan^2 nasional kita semua, maupun bagi nama baik tiap^2 Angkatan Bersendjata kita. Usaha^2 jang demikian dapat merusak dwitunggal antara Angkatan Bersendjata dan Rakjat.

III. KESIMPULAN2

Sebagai achir kata, ada baiknja kiranja kalau saja setjara singkat berusaha menjimpulkan pokok2 jang telah saja kemukakan dalam tjeramah ini.

Pertama, Angkatan Laut RI, seperti halnja setiap Angkatan Bersendjata, harus mengabdikan diri kepada Revolusi Indonesia, sesuai dengan tradisi2 kepahlawanan pelaut2 kita, baik dizaman pendjadjahan Belanda dengan pemberontakan diatas kapal „Zeven Provincien" maupun dizaman perdjuangan membela Republik kita, sampai kepada perdjuangan untuk membebaskan Irian Barat. Untuk tugas ini, maka politik revolusioner harus difahami setjara mendalam, karena ALRI ber-sama2 dengan angkatan2 lainnja harus dipimpin oleh politik revolusioner itu, dipimpin oleh Manipol.

Kedua, ALRI, seperti halnja semua Angkatan Bersendjata RI, adalah alat pembela dan penjelamat Revolusi, dan harus membela Rakjat, bersatu dengan Rakjat, dan sependirian dengan Rakjat, tak lain karena ALRI kita memang merupakan bagian integral daripada Rakjat, dan terdiri dari Rakjat.

Ketiga, negeri kita berwilajah luas, terdiri dari be-ribu2 pulau, besar dan ketjil, dengan pantai jang amat pandjang, dengan lautan2 luas, dan berpenduduk 100 djuta orang. Negeri kita ini

masih belum merdeka penuh, jaitu masih terdapat pengaruh[2] imperialisme dan kolonialisme, dan djuga masih semi-feodal, dan oleh karena itu ALRI kita harus memupuk terus tjiri kepribadiannja jang anti-fasis, demokratis, anti-imperialis dan ber-tjita[2] Sosialisme. Hanja dengan demikian akan terdapat dasar jang kokoh untuk turut serta menjelesaikan Revolusi Indonesia jang anti-imperialis dan anti-feodal dan berharidepan Sosialisme.

Keempat, politik pertahanan nasional kita harus sesuai sepenuhnja dengan revolusi kita. Faktor[2] seperti letak serta susunan geografis harus dipergunakan se-efektif[2]nja untuk tudjuan[2] revolusi kita. Pandangan geo-politik jang bertudjuan membenarkan politik expansi disatu fihak dan politik-menjerahisme difihak negeri[2] jang mendjadi objek kaum expansionis-imperialis, dengan sendirinja tidak bisa diberi tempat dalam politik pertahanan nasional kita jang harus diatas segala-galanja bersifat revolusioner dan dipimpin oleh politik revolusioner (Manipol).

Kelima, kepentingan[2] revolusi serta letak dan susunan negeri kita jang bersifat kepulauan berarti, bahwa politik pertahanan kita harus memberi tempat jang sama kepada setiap Angkatan Bersendjata dengan tidak menitikberatkan kepada salahsatu Angkatan. Pertahanan nasional hanja bisa kuat dengan tertjapainja kordinasi efektif antara keempat angkatan.

Keenam, ALRI kita jang bertradisi anti-imperialisme harus memegang peranan vital dalam memperkuat politik luarnegeri RI jang anti-impe-

rialis, jang membela the new emerging forces dan melawan the old established forces. Tugas ini sangat perlu didjundjung tinggi oleh ALRI kita dimana negeri kita dikelilingi djustru oleh negara^2 the old established forces dengan angkatan^2 laut mereka jang selalu siap untuk mengepung negeri kita jang berpolitik anti-imperialis itu.

Demikian masalah^2 jang ingin saja kemukakan dalam tjeramah ini. Mudah^{2}an, tjeramah ini akan bermanfaat, terutama dalam mempererat hubungan antara kita, dan dengan demikian ikut pula merealisasi wedjangan Bung Karno mengenai memberantas Komunisto-phobi dan djuga merealisasi serta mendjundjung tinggi sembojan Dwitunggal Angkatan Bersendjata dan Rakjat.

I S I

hal.

Untuk lebih mendalami soal² jang diadjukan didalam tjeramah ini, buku² **D.N. Aidit** berikut ini akan sangat membantu :

* Pilihan Tulisan djilid I .... (habis)
* Pilihan Tulisan djilid II .... (habis)
* Pilihan Tulisan djilid III .... (akan terbit)
* Pengantar Etika dan Moral Komunis Rp. 50.-
* Dekon dalam udjian .... „ 120.—
* Tentang Marxisme .... Rp. 150.—
* Berani, berani, sekali lagi berani ...... „ 125.—
* Hajo, ringkus dan ganjang kontra-revolusi ! .... „ 40.
* PKI dan AURI .... „ 25.—
* PKI dan Polisi .... „ 30.—
* PKI dan Angkatan Darat .... (sudah terbit